

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pemasukan kas negara yang utama. Pemasukan ini nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara dengan tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan, mengadakan dan memfasilitasi berbagai program dan kegiatan dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Fungsi pemerintah dalam perekonomian adalah: (1) Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan; (2) Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon; (3) Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Pemerintah membutuhkan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan semua fungsi tersebut. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatannya.

Tabel 1.1 Penerimaan pajak Indonesia Tahun 2009 – 2016 (IDR'000.000.000.00)

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PENERIMAAN NEGARA	848,763	995,272	1,209,604	1,336,338	1,436,403	1,548,413	1,508,296	1,555,934
PENERIMAAN PERPAJAKAN	619,922	723,307	873,874	980,518	1,077,307	1,146,866	1,240,419	1,284,970
Pajak Dalam Negeri	601,252	694,392	819,752	930,862	1,029,850	1,103,218	1,205,479	1,249,499
Pajak Penghasilan	317,615	354,152	431,122	465,070	506,443	546,181	602,308	666,212
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	193,068	219,538	277,800	337,585	384,714	409,182	423,711	412,213
PBB	24,270	28,581	29,893	28,969	25,305	23,476	29,250	19,443
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6,465	8,026	1	-	-	-	-	-
Cukai	56,718	66,166	77,010	95,028	108,452	118,086	144,641	143,525
Pajak Lainnya	3,116	3,371	3,928	4,211	4,937	6,293	5,568	8,105
Pajak Perdagangan Internasional	18,670	28,915	54,121	49,656	47,457	43,648	34,940	35,471
Bea Masuk	18,098	19,759	25,266	28,418	31,621	32,319	31,213	32,472
Bea Keluar	565	8,898	28,856	21,238	15,835	11,329	3,727	2,999
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	227,174	268,942	331,472	351,679	354,563	398,591	249,154	261,976
Penerimaan Sumber Daya Alam	138,959	168,825	213,823	225,844	226,406	240,848	100,972	64,902
Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN	26,050	30,097	28,184	30,798	34,026	40,314	37,644	37,133
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	53,796	59,429	69,361	73,459	69,672	87,747	72,684	117,995
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	8,370	10,591	20,104	21,704	24,648	29,681	37,855	41,946
PENERIMAAN HIBAH	1,667	3,023	4,258	4,142	4,534	2,957	18,723	8,988

Sumber data: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (diolah penulis)

Detail dapat dilihat pada lampiran 1 (hal xxiii). Dari data Penerimaan Negara tahun 2009-2016, Penerimaan Negara Indonesia didominasi oleh Penerimaan Perpajakan dengan Persentase terhadap Penerimaan Negara berkisar antara 72.2 hingga 82.6% disusul oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkisar antara 16.5 hingga 27.4% kemudian Hibah berkisar 0.2 hingga 1.2%.

Tabel 1.2 Analisis Persentase Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah Terhadap Penerimaan Negara

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Perpajakan	73.0%	72.7%	72.2%	73.4%	75.0%	74.1%	82.2%	82.6%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	26.8%	27.0%	27.4%	26.3%	24.7%	25.7%	16.5%	16.8%
Penerimaan Hibah	0.2%	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	1.2%	0.6%

Sumber data: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (diolah penulis)

Penerimaan Pajak tertinggi terjadi pada tahun 2016, sedangkan terjadi pada tahun 2011. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar terjadi pada tahun 2011, sedangkan terendah pada tahun 2015. Selanjutnya untuk Penerimaan Hibah tertinggi terjadi pada tahun 2015 sedangkan penerimaan hibah terendah terjadi pada tahun 2014. Peningkatan Penerimaan Perpajakan berada pada kisaran -2.8 hingga 21% dengan tahun tertinggi terjadi pada 2010-2011, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2015-2016.

Tabel 1.3 Analisis Persentase Tren Kenaikan Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah

Uraian	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Penerimaan Perpajakan	12.1%	21.0%	17.7%	12.3%	6.0%	3.4%	-2.8%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	21.0%	47.3%	7.4%	11.9%	17.0%	21.6%	9.8%
Penerimaan Hibah	44.9%	29.0%	-2.8%	8.6%	-53.3%	84.2%	-108.3%

Sumber data: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (diolah penulis)

Penerimaan Pajak terdiri atas Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Persentase Pajak Dalam Negeri terhadap Penerimaan Perpajakan pada tahun 2009 – 2016 berkisar antara 94 – 97%. Tahun terendah terjadi pada tahun 2011. Tahun tertinggi terjadi pada tahun 2009, 2015 dan 2016. Sedangkan untuk Pajak Perdagangan Internasional Persentase terhadap Penerimaan Perpajakan pada tahun 2009 – 2016 berkisar antara 2.8 – 6.2%. Tahun terendah terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Tahun tertinggi terjadi pada tahun 2011.

Tabel 1.4 Analisis Persentase Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional Terhadap Penerimaan Perpajakan

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Perpajakan	73.0%	72.7%	72.2%	73.4%	75.0%	74.1%	82.2%	82.6%
Pajak Dalam Negeri	97.0%	96.0%	93.8%	94.9%	95.6%	96.2%	97.2%	97.2%
Pajak Perdagangan Internasional	3.0%	4.0%	6.2%	5.1%	4.4%	3.8%	2.8%	2.8%

Sumber data: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (diolah penulis)

Peningkatan Pajak Dalam Negeri di tahun observasi berkisar antara 4 hingga 15%, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010-2011, sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2015-2016. Kemudian untuk Pajak Perdagangan Internasional kenaikan berkisar antara -25% yang terjadi pada tahun 2014-2015 hingga 47% yang terjadi pada tahun 2010-2011.

Tabel 1.5 Analisis Persentase Tren Kenaikan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional

Uraian	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
PENERIMAAN PERPAJAKAN	12.1%	21.0%	17.7%	12.3%	6.0%	3.4%	-2.8%
Pajak Dalam Negeri	13%	15%	12%	10%	7%	8%	4%
Pajak Perdagangan Internasional	35%	47%	-9%	-5%	-9%	-25%	1%

Sumber data: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (diolah penulis)

Penerimaan terbesar pajak dalam negeri di dominasi oleh PPh, disusul oleh PPN & PPnBM, kemudian cukai, PBB serta Pajak Lainnya. Persentase PPh terhadap pajak dalam negeri berkisar antara 49.2% di tahun 2013 hingga 53.3% di tahun 2016. Sedangkan persentase kenaikan PPh berkisar antara 7.28% di tahun 2013-2014 hingga 17.9% di tahun 2010-2011. Pendapatan Pajak Penghasilan di dominasi dengan PPh Non Migas sektor PPh Pasal 25/29 badan, disusul secara fluktuatif oleh PPh Migas dan PPh Pasal 21. Tren kenaikan PPh Pasal 25/29 Badan fluktuatif, pada tahun 2010 naik sebesar 8.5% dari tahun 2009, tahun 2011 naik sebesar 15%, tahun 2012 turun sebesar 1.6%, tahun 2013 naik sebesar 1.4% dan tahun 2014 turun sebesar 4%, tahun 2015 naik sebesar 18.9% dan tahun 2016 turun sebesar 7.9%. Kisaran persentase sektor PPh Pasal 25/29 badan terhadap pendapatan pajak penghasilan sebesar 25% yang terjadi pada tahun 2016 hingga 38% yang terjadi pada tahun 2009. Sedangkan kisaran persentase sektor PPh Pasal 25/29 badan terhadap Penerimaan Perpajakan sebesar 12.9% hingga 19.4%, terendah terjadi di tahun 2014, tertinggi terjadi di tahun 2009. Selanjutnya kisaran persentase sektor PPh Pasal 25/29 badan terhadap Penerimaan Negara sebesar 9.6% hingga 14.2%, terendah terjadi di tahun 2014, tertinggi terjadi di tahun 2009.

Tabel 1.6 Analisis Persentase PPh Pasal 25/29 Badan

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PPh Pasal 25/29 Badan Terhadap Pajak Penghasilan	38%	37%	36%	33%	30%	27%	30%	25%
PPh Pasal 25/29 Badan Terhadap Penerimaan Perpajakan	19.4%	18.2%	17.7%	15.5%	14.3%	12.9%	14.8%	13.2%
PPh Pasal 25/29 Badan Terhadap Penerimaan Negara	14.2%	13.2%	12.8%	11.4%	10.7%	9.6%	12.1%	10.9%

Sumber data: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (diolah penulis)

Tabel 1.7 Penerimaan pajak Malaysia Tahun 2009 – 2016 (RM'000.00)

DESCRIPTION	2,009	2,010	2,011	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016
TAX REVENUE	106,504	109,516	134,885	151,643	155,952	164,205	165,440	167,101
DIRECT TAXES	78,375	79,009	102,242	116,937	120,523	126,743	111,770	110,500
Income Taxes	74,917	74,451	96,732	110,662	113,300	118,996	103,985	102,438
Individual Income Tax	15,590	17,805	20,203	22,977	23,055	24,423	26,321	28,163
Company Income Tax	30,199	36,266	46,888	51,288	58,175	65,240	63,679	63,193
Petroleum Income Tax	27,231	18,713	27,748	33,934	29,753	26,240	11,559	8,517
Withholding Tax	1,328	1,268	1,519	2,097	2,008	26,956	2,316	2,437
Cooperatives Income Tax	546	378	357	345	286	2184	80	101
Others	23	21	17	21	23	169	30	27
Other Direct Taxes	3,458	4,558	5,510	6,275	7,223	7,747	7,785	8,062
Stamp Duty	3,349	4,192	4,929	5,595	6,364	6,458	5,974	6,162
Real Property Gains Tax	0	0	0	608	785	1210	1,729	1,791
Others	109	366	581	72	74	79	82	109
INDIRECT TAXES	28,129	30,507	32,643	34,706	35,429	37,462	53,670	56,601
Export Duty	1,152	1,810	2,081	1,968	1,930	1,893	1,039	813
Crude Oil	1,104	1,745	1,997	1,928	1,632	1,577	989	604
Palm Oil	38	52	73	34	285	310	43	203
Others	10	13	11	6	13	6	7	6
Import Duty	2,114	1,966	2,026	2,282	2,524	2,670	2,732	2,736
Spirits and Malt Liquor	62	65	79	79	81	107	135	127
Tobacco, Cigarettes & Cigars	75	37	27	35	114	37	44	35
CKD and CBU vehicles	444	582	677	754	466	775	656	618
Others	1,533	1,282	1,243	1,414	1,863	1,751	1,897	1,956
Excise Duty	10,068	11,770	11,517	12,187	12,193	12,925	11,890	11,801
Spirits and Malt Liquor	1,268	1,369	1,457	1,417	1,520	1,500	1,635	1,709
Tobacco, Cigarettes & Cigars	2,839	2,930	3,183	3,281	3,275	3,417	3,318	3,478
Motor Vehicles	4,214	4,958	6,512	7,085	7,390	8,003	6,926	6,610
Others	1,747	2,513	365	404	8	5	11	4
Sales Tax	8,603	8,171	8,577	9,496	10,068	10,939	5,223	79
Service Tax	3,344	3,926	4,982	5,583	5,944	6,277	3,038	67
Levy/GST	438	440	919	552	173	216	27012	38,500
Oil Palm Fruit	16	127	761	388	7	0	0	0
Electricity	280	162	0	0	0	0	0	0
Goods Vehicles	143	151	159	164	165	0	0	0
Miscellaneous Indirect Taxes	2,410	2,424	2,541	2,638	2,597	2,542	2,736	2,605
Others	4,025	3,484	3,859	2,246	2,402	2,552	2,514	2,597
SERVICE FEES	949	1,122	1,321	1,218	1,262	1,452	1,537	2,636
SALES OF GOODS	68	92	107	637	1,222	1,096	602	1,188
RENTALS	181	197	197	177	176	188	187	156

Tabel 1.7 Penerimaan pajak Malaysia Tahun 2009 – 2016 Lanjutan

DESCRIPTION	2,009	2,010	2,011	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016
NON-TAX REVENUE	50,789	48,867	49,423	54,909	54,450	53,899	51,467	42,694
LICENSES AND PERMITS	10,686	10,331	11,190	13,570	13,418	14,254	12,540	11,843
Petroleum Royalty	4,805	4,855	5,148	6,423	6,186	6,532	5,142	3,661
Motor Vehicles Licences	1,856	1,992	2,183	2,283	2,407	2,532	2,630	2,795
Levy on Foreign Workers	0	0	0	2,618	2,423	2,638	2,254	2,790
INTERESTS & PROCEEDS ON INVESTMENTS	37,394	34,576	34,005	36,736	35,306	3,375	32,838	23,299
PETRONAS Dividend	30,000	30,000	30,000	26,260	27,000	29,000	26,000	16,000
Khazanah Nasional Dividend		300	300	3,000	851	250	3,000	3,000
Bank Negara Dividend	1,500	2,000	2,000	2,000	1,500	1,500	1,400	1,000
Others	5,894	2,276	3,680	5,476	5,955	3,006	2,438	3,299
FINES AND PENALTIES	690	1,100	1,191	1,007	1,078	1,117	1,285	1,346
MTJA	0	0	0	0	0	2,031	2,135	2,170
OTHERS	821	1,449	1,412	1,564	1,988	5	343	56
NON-REVENUE RECEIPTS	1,068	793	544	877	1,590	1,667	1,290	1,887
REVENUE FROM FEDERAL TERRITORIES	278	477	567	483	1,378	855	892	913
TOTAL REVENUE	158,639	159,653	185,419	207,913	213,370	220,626	219,089	212,595

Sumber data: *Penerimaan Sebenar Hasil Kerajaan Persekutuan Malaysia* (diolah penulis)

Malaysia juga merupakan negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negaranya. Persentase penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara untuk tahun 2009 - 2016 berkisar antara 67 - 79%. Tren kenaikan penerimaan negara berkisar antara -0.7 – 13.9% sedangkan tren penerimaan perpajakan berkisar antara 0.7% yang terendah terjadi pada tahun 2015 hingga 18.8% yang tertinggi terjadi pada tahun 2011.

Tabel 1.8 Analisis *Total Revenue*, *Tax Revenue* dan *Company Income Tax*

<i>DESCRIPTION</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase <i>Tax Revenue</i> terhadap <i>Total Revenue</i>	67%	69%	73%	73%	73%	74%	76%	79%
Persentase <i>Company Income Tax</i> terhadap <i>Tax Revenue</i>	28%	33%	35%	34%	37%	40%	38%	38%
Persentase <i>Company Income Tax</i> terhadap <i>Total Revenue</i>	19.0%	22.7%	25.3%	24.7%	27.3%	29.6%	29.1%	29.7%

Sumber data: *Penerimaan Sebenar Hasil Kerajaan Persekutuan Malaysia* (diolah penulis)

Company Income Tax menjadi sektor dengan realisasi penerimaan terbesar dalam pendapatan negara Malaysia. Persentase *Company Income Tax* terhadap penerimaan pajak berkisar antara 28 - 40% pada tahun observasi dengan tren kenaikan pada kisaran terendah sebesar -0.8% pada tahun 2016 dan tertinggi sebesar 22.7% pada tahun 2011, sedangkan persentase *Company Income Tax* terhadap penerimaan Negara pada tahun observasi berkisar antara 19.0% - 29.7%. Berikut hasil analisa detail persentase persentase *Tax Revenue* terhadap *Total Revenue*, persentase *Company Income Tax* terhadap *Tax Revenue* dan persentase *Company Income Tax* terhadap *Total Revenue*.

Tabel 1.9 Analisis *Total Revenue*, *Tax Revenue* dan *Company Income Tax*

DESCRIPTION	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Persentase Kenaikan <i>Tax Revenue</i>	2.8%	18.8%	11.1%	2.8%	5.0%	0.7%	1.0%
Persentase Kenaikan <i>Total Revenue</i>	0.6%	13.9%	10.8%	2.6%	3.3%	-0.7%	-3.1%
Persentase Kenaikan <i>Company Income Tax</i>	16.7%	22.7%	8.6%	11.8%	10.8%	-2.5%	-0.8%

Sumber data: *Penerimaan Sebenar Hasil Kerajaan Persekutuan Malaysia* (diolah penulis)

Table 1.10 Penerimaan pajak Thailand Tahun 2009 – 2016 (THB'000.00)

Item Name	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Revenue Department	1,757,882. 571	1,729,221. 495	1,729,874. 280	1,764,544. 889	1,617,360.52	1,515,596. 832	1,264,584. 210	1,138,564. 899
Personal income taxes	318,946. 972	302,484. 720	280,996. 347	299,076. 223	266,234. 719	236,292. 925	208,377. 617	198,095. 437
Corporation taxes	604,957. 564	566,150.19	570,121. 708	592,349. 676	544,642. 935	574,074. 601	454,562. 096	392,171. 864
Petroleum income taxes	46,297. 381	83,521. 365	102,164. 040	113,290.81	94,096. 419	81,444. 123	67,598. 998	90,712. 404
Value added taxes	716,401. 511	708,934. 539	711,556. 800	698,033. 516	659,792. 148	577,637. 872	502,175. 730	431,775. 379
Specific business taxes	56,342. 490	54,168. 206	53,033. 895	48,791. 649	41,048. 588	35,585. 194	22,893. 014	18,099. 037
Stamp duties	14,465. 922	13,573. 430	11,662. 656	12,713. 545	11,183. 665	10,283. 000	8,734. 774	7,487. 826
Others	470.31	388. 516	338. 833	289. 899	361. 679	279. 117	241. 979	222. 952
Excise Department	517,773. 000	439,095. 000	382,737. 000	432,835. 000	379,412. 560	399,778. 479	405,862. 086	291,221. 180
Oil taxes	177,694. 000	127,785. 000	63,403. 000	63,532. 000	61,061. 250	117,913. 858	152,825. 124	91,058. 520
Tobacco taxes	65,440.00	62,735. 000	61,002. 000	67,893. 000	59,914. 580	57,195. 962	53,381. 263	43,936. 040
Liquor taxes	61,952. 000	62,488. 000	64,655. 000	52,641. 000	53,288. 050	48,625. 527	42,398. 013	37,981. 700
Beer taxes	86,141. 000	80,116. 000	76,559. 000	69,119. 000	64,870.20	61,497. 876	58,830.10	48,993. 370
Car taxes	100,765. 000	80,705. 000	93,473. 000	153,872. 000	117,144. 490	92,843. 510	77,202. 153	49,278. 130
Beverage taxes	17,899. 000	17,600.00	16,623. 000	17,773. 000	16,206. 770	14,525. 907	14,245. 299	12,185. 930
Electronic appliance taxes	94. 000	470.00	519. 000	1,002. 000	974. 990	1,183. 490	1,614. 584	3,110.30
Motorcycle taxes	2,951. 000	2,914. 000	2,585. 000	2,934. 000	2,317. 050	2,283. 105	1,979. 389	1,608. 300
Battery taxes	2,392. 000	2,190.00	2,075. 000	2,296. 000	2,126. 420	2,197. 058	1,947. 226	1,478. 520
Telecommunication taxes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Table 1.10 Penerimaan pajak Thailand Tahun 2009 – 2016 Lanjutan

Others taxes	1,543. 000	1,322. 000	1,158. 000	1,209. 000	1,097. 470	1,087. 970	1,038. 507	1,061. 990
Miscellaneous	902. 000	770.00	685. 000	564. 000	411. 170	424. 217	399. 718	528. 150
Customs Department	111,542. 000	115,489. 000	109,014. 941	113,757. 092	119,033. 161	102,882. 680	97,148. 188	80,287. 807
Import duties	108,715. 000	112,210.00	105,761. 295	110,627. 936	116,385. 005	99,972. 706	93,512. 436	77,186. 953
Export duties	105. 000	204. 000	179. 813	305. 433	322. 609	241. 658	169. 002	403. 867
Miscellaneous	2,722. 000	3,075. 000	3,073. 833	2,823. 723	2,325. 547	2,668. 316	3,466. 750	2,696. 987
Other	424,669. 158	333,798. 528	272,648. 669	260,514. 692	239,245. 304	206,064. 051	235,460.67	174,223. 549
Other government agents	284,318. 000	169,236. 000	130,527. 000	152,569. 000	112,121. 000	102,687. 595	140,030.96	83,761. 188
Treasury Department	6,625. 158	3,310.28	5,430.69	6,497. 692	4,376. 304	4,582. 626	3,876. 751	3,821. 690
State Enterprise Reforms	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	0.00	0.00
State Enterprises	133,726. 000	161,252. 000	136,691. 000	101,448. 000	122,748. 000	98,793. 830	91,553. 220	86,640.70
Total (Gross)	3,187,256. 364	2,977,679. 766	2,562,478. 611	2,571,651. 673	2,355,051. 177	2,224,322. 042	2,003,055. 351	1,684,297. 435
Deduct	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tax rebates of Revenue Department	274,882. 000	267,418. 000	291,007. 000	283,471. 000	264,620.00	230,013. 520	208,732. 825	199,407. 519
VAT	208,462. 000	217,182. 000	226,087. 000	228,941. 000	219,741. 000	188,471. 142	160,051. 779	157,838. 014
Other taxes	66,420.00	50,236. 000	64,920.00	54,530.00	44,879. 000	41,542. 378	48,681. 046	41,569. 505

Table 1.10 Penerimaan pajak Thailand Tahun 2009 – 2016 Lanjutan

VAT allocation for PAO (Provincial Administration Organizations)	14,557. 000	14,399. 000	15,438. 000	15,476. 000	14,834. 000	12,676. 728	11,095. 753	9,040.04
Export duties compensation	17,450.00	16,541. 000	16,178. 000	16,946. 000	15,335. 000	14,813. 605	13,005. 098	11,159. 957
Total (Net)	2,880,367. 364	2,679,321. 766	2,239,855. 611	2,255,758. 673	2,060,262. 177	1,966,818. 189	1,770,221. 675	1,464,689. 556
Value added taxes	375,389. 635	360,075. 743	68,203. 721					
Value added taxes	0.00	0.00	0.00					

Sumber data: *Revenue Department, Excise Department, Customs department, Treasury Departmen, Comptroller General's Department and State Enterprise Policy Office* (diolah penulis)

Thailand juga menjadikan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan utamanya, dengan tren sebesar 58.1% - 68.7% per tahun. Tren penerimaan negara sebesar 15.9% tahun 2010, 9.9% tahun 2011, 5.6% tahun 2012, 8.4% tahun 2013, dan turun sebesar 0.4% tahun 2014, naik lagi sebesar 13.9% kemudian pada tahun 2016 naik sebesar 6.6%.

Tabel 1.11 Analisis Persentase *Revenue Department, Corporation taxes* dan *Total Revenue*

<i>Item Name</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Revenue Department	67.6%	63.1%	68.1%	68.7%	68.6%	67.5%	58.1%	55.2%
Corporation taxes terhadap Revenue Department	34.4%	35.9%	37.9%	33.7%	33.6%	33.0%	32.7%	34.4%
Corporation taxes terhadap Total Revenue	23.3%	22.7%	25.8%	23.1%	23.0%	22.2%	19.0%	19.0%

Sumber data: *Revenue Department, Excise Department, Customs department, Treasury Departmen, Comptroller General's Department and State Enterprise Policy Office* (diolah penulis)

Persentase kenaikan penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara pada titik terendah yaitu sebesar -0.04% pada tahun 2015 dari tahun 2014 atau turun pada tingkat yang tidak signifikan, sedangkan titik tertinggi sebesar 16.6% yang terjadi pada tahun 2010-2011. *Value added taxes* merupakan sektor penerimaan terbesar dalam penerimaan negara Thailand disusul dengan *Corporation Taxes*. Persentase *Corporation Taxes* terhadap penerimaan pajak sebesar 32.7% - 37.9%, sedangkan Persentase terhadap penerimaan negara secara keseluruhan sebesar 19.0% - 25.8%. Persentase kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 10.0% tahun 2010, 16.6% tahun 2011, 6.3% tahun 2012, 8.3% tahun 2013, turun sebesar 2.0% tahun 2014, turun lagi sebesar 0.04% kemudian pada tahun 2016 naik sebesar 1.6%. Persentase kenaikan *Corporation taxes* sebesar 13.7% tahun 2010, 20.8% tahun 2011, turun sebesar 5.4% tahun 2012, naik sebesar 8.1% tahun 2013, turun sebesar 3.9% tahun 2014, turun lagi sebesar 0.7% kemudian pada tahun 2016 naik sebesar 6.4%

Tabel 1.12 Analisis Persentase Tren Kenaikan *Revenue Department, Corporation taxes* dan *Total Revenue*

Item Name	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Revenue Department	10.0%	16.6%	6.3%	8.3%	-2.0%	-0.04%	1.6%
Corporation taxes	13.7%	20.8%	-5.4%	8.1%	-3.9%	-0.7%	6.4%
Total Revenue	15.9%	9.9%	5.6%	8.4%	-0.4%	13.9%	6.6%

Sumber data: *Revenue Department, Excise Department, Customs department, Treasury Departmen, Comptroller General's Department and State Enterprise Policy Office* (diolah penulis)

Tabel 1.13 Penerimaan pajak Philipina Tahun 2009 – 2016 (PHP'000.00)

PARTICULAR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TAX REVENUES	981,631	1,093,643	1,202,066	1,427,426	1,535,697	1,720,116	1,815,474	1,980,389
Tax on Net Income and Profit	435,371	489,222	571,896	670,977	718,210	784,859	846,201	924,585
Tax on Property	1,426	1,980	2,400	2,794	3,552	5,450	5,636	6,638
Tax on Domestic Goods and Services	324,049	521,546	583,058	688,049	509,010	560,530	596,103	652,801
General Sales, Turnover or VAT	168,679	329,713	383,449	464,971	250,619	278,727	287,231	331,414
Selected Excises on Goods	59,823	86,799	81,037	84,930	118,906	135,315	158,319	163,506
Selected Taxes on Services	42,089	44,917	46,398	53,792	59,921	55,881	58,378	64,624
Taxes on the Use of Goods or Property or Permission to Perform Activities	9,781	9,957	10,714	12,022	574	592	613	505
Other Taxes	44,063	50,159	61,460	72,334	78,990	90,015	91,562	92,752
Taxes on International Trade and Transactions	220,784	80,896	44,712	65,607	304,925	369,277	367,534	396,365
NONTAX REVENUES	141,580	114,283	156,946	133,196	177,459	186,465	230,698	214,867
Fees and Charges	70,085	58,648	71,082	67,919	30,541	32,771	36,405	39,819
Income from Treasury Operation (BTr)	69,912	54,315	33,453	63,277	47,466	53,390	56,271	45,370
Interest Income on NG Deposits	2,687	2,224	2,033	1,956	3,432	3,159	5,906	4,276
Interest on Advances to Government Corporation (GOCCs)	510	159	1,036	715	190	142	110	10
Income from Investment (BSF/SSF)	29,949	23,816	25,374	25,658	37,201	41,920	42,684	34,656

Tabel 1.13 Penerimaan pajak Philipina Tahun 2009 – 2016 Lanjutan

PARTICULAR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Guarantee Fee	6,698	2,389	2,533	3,400	2,245	3,120	4,017	1,947
Foreign Exchange Risk Cover Fee						1,577	1,578	1,496
Interest on Bond Holdings	12	12			-	-		
Gain on Foreign Exchange	2,209	1,112	1,590	1,500	-	-		
Government Services Income	1,537	1,152	887	916	4,398	3,472	1,976	2,985
Fidelity Bond Premia						675	781	874
Subscription Fee - RoSS Participants						10	12	11
Escheat of Unclaimed Balances						140	38	78
Service Fee on Relent Loans						2,597	1,118	558
Other Miscellaneous Income						50	27	1,464
NG Income Collected by BTr	26,310	23,451	41,783	27,605	33,547	40,054	53,764	56,367
Dividends on Share of Stocks	13,803	12,013	28,706	15,500	18,903	24,374	32,269	28,888
NG Share from Airport Terminal Fee	425	476	473	455	481	555	602	879
NG Share from PAGCOR Income	11,050	10,343	11,437	11,100	13,039	14,021	19,995	24,877
NG Share from MIAA Profit	1,032	619	1,167	550	1,124	1,104	898	1,723
Other Existing Non-Tax Revenues	-		10,373	1,527	65,584	60,017	84,094	73,233
Malampaya Royalties						22,301	14,321	13,435
Other Non-Tax Revenues				1,527		37,716	69,773	59,798
Foreign Grants	191	406	255		321	233	164	78
PRIVATIZATION	1,390	914	930	2,000	2,936	1,946	62,783	657
TOTAL REVENUES	1,123,211	1,207,926	1,359,942	1,560,622	1,716,092	1,908,527	2,108,955	2,195,913

Sumber data: *Philippine Department of Finance* (diolah penulis)

Begitu juga dengan Philipina yang menjadikan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negaranya. Tren penerimaan negara Philipina dari tahun 2009-2016 adalah naik sebesar 7% di tahun 2010, naik 23% di tahun 2011, turun 15% di tahun 2012, naik sebesar 21% di tahun 2013, naik sebesar 10% di tahun 2014, naik sebesar 10% di tahun 2015, naik sebesar 4% di tahun 2016. Persentase penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara adalah sebesar 87-91% per tahun nya. *Tax on Net Income and Profit* merupakan sektor dengan sumbangsih terbesar bagi penerimaan negara. Persentase *Tax on Net Income and Profit* terhadap penerimaan pajak sebesar 44-48% per tahun, sedangkan Persentase *Tax on Net Income and Profit* terhadap total penerimaan negara adalah sebesar 39-43% per tahun.

Tabel 1.14 Analisis Persentase *Tax Revenue, Tax on Net Income and Profit*, dan *Total Revenue*

PARTICULAR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Tax Revenue terhadap Total Revenue	87%	91%	91%	88%	89%	90%	86%	90%
Tax on Net Income and Profit terhadap Tax Revenue	44%	45%	47%	48%	47%	46%	47%	47%
Tax on Net Income and Profit terhadap Total Revenue	39%	41%	43%	42%	42%	41%	40%	42%

Sumber data: *Philipine Department of Finance* (diolah penulis)

Tren penerimaan pajak Philipina dari tahun 2009-2016 adalah naik sebesar 10% di tahun 2010, naik 23% di tahun 2011, turun 19% di tahun 2012, naik sebesar 22% di tahun 2013, naik sebesar 11% di tahun 2014, naik sebesar 5% di tahun 2015, naik sebesar 8% di tahun 2016.

Tabel 1.15 Analisis Persentase Tren Kenaikan *Total Revenue*, *Tax Revenue*, dan *Tax on Net Income and Profit*

PARTICULAR	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
TOTAL REVENUES	7%	23%	-15%	21%	10%	10%	4%
TAX REVENUES	10%	23%	-19%	22%	11%	5%	8%
Tax on Net Income and Profit	11%	27%	-17%	20%	8%	7%	8%

Sumber data: *Philippine Department of Finance* (diolah penulis)

Tren penerimaan pajak Philipina dari tahun 2009-2016 adalah naik sebesar 11% di tahun 2010, naik 27% di tahun 2011, turun 17% di tahun 2012, naik sebesar 20% di tahun 2013, naik sebesar 8% di tahun 2014, naik sebesar 7% di tahun 2015, naik sebesar 8% di tahun 2016.

Tabel 1.16 Penerimaan pajak Singapura Tahun 2009-2016 (SGD'000.00)

Item Name	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016
Operating Revenue	39,547	43,848	51,077	55,814	57,020	60,840	64,820	68,670
Tax Revenue	37,239	43,438	48,187	52,690	53,868	57,510	61,080	65,050
Corporate Income Tax	9,551	10,687	12,096	12,821	12,680	13,370	13,820	13,450
Personal Income Tax	7,250	6,470	6,871	7,714	7,688	8,930	9,230	10,480
Withholding Tax	-	957	1,258	1,337	1,152	1,130	1,400	1,460
Statutory Boards' Contributions	410	573	353	539	530	520	440	780
Assets Taxes	1,987	2,803	3,902	3,768	4,182	4,340	4,460	4,370
Customs and Excise Taxes	2,125	2,048	2,133	2,142	2,189	2,540	2,830	2,750
Goods and Services Tax	6,914	8,185	8,687	9,038	9,513	10,220	10,350	10,850
Motor Vehicle Taxes	1,856	1,851	1,920	1,803	1,655	1,600	1,760	2,310
Vehicle Quota Premiums	623	1,602	2,112	2,572	2,722	3,390	5,420	6,860
Betting Taxes	1,727	2,279	2,373	2,305	2,379	2,590	2,720	2,690
Stamp Duty	2,386	3,277	3,175	4,309	3,930	2,780	2,770	2,940
Other Taxes ¹	2,410	2,706	3,307	4,342	5,248	6,100	5,880	6,110
Other Fees and Charges²	2,142	2,384	2,587	2,708	2,903	3,010	3,250	3,130
Others	165	226	302	416	250	320	500	500

Sumber data: *Actual Revenue Singapore Government* (diolah penulis)

Singapura sangat mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negaranya. Pada tahun 2009-2016, Persentase penerimaan pajak terhadap pendapatan operasi negara Singapura rata-rata adalah sebesar 94%, pada tahun 2010 naik sebesar 99%, pada tahun 2014 dan 2016 naik menjadi 95%. Tren kenaikan penerimaan operasional negara adalah sebesar 10% pada tahun 2010, 14% pada tahun 2011, 8% pada tahun 2012, 2% pada tahun 2013, 6% pada tahun 2014, 6% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016. *Corporate Income Tax* merupakan sektor dengan Persentase penerimaan terbesar bagi anggaran negara Singapura. Persentase *Corporate Income Tax* terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 21 -26%, sedangkan Persentase *Corporate Income Tax* terhadap penerimaan negara secara keseluruhan adalah sebesar 20 - 24%.

Tabel 1.17 Analisis Persentase *Operating Revenue*, *Tax Revenue* dan *Corporate Income Tax*

Detail	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016
Tax Revenue terhadap Operating Revenue	94%	99%	94%	94%	94%	95%	94%	95%
Corporate Income Tax terhadap Tax Revenue	26%	25%	25%	24%	24%	23%	23%	21%
Corporate Income Tax terhadap Operating Revenue	24%	24%	24%	23%	22%	22%	21%	20%

Sumber data: *Actual Revenue Singapore Government* (diolah penulis)

Tren kenaikan penerimaan perpajakan adalah sebesar 14% pada tahun 2010, 10% pada tahun 2011, 9% pada tahun 2012, 2% pada tahun 2013, 6% pada tahun 2014, 6% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016.

Table 1.18 Analisis Tren Persentase Kenaikan *Operating Revenue*, *Tax Revenue* dan *Corporate Income Tax*

Detail	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016
Operating Revenue	10%	14%	8%	2%	6%	6%	6%
Tax Revenue	14%	10%	9%	2%	6%	6%	6%
Corporate Income Tax	11%	12%	6%	-1%	5%	3%	-3%

Sumber data: *Actual Revenue Singapore Government* (diolah penulis)

Selanjutnya tren kenaikan pajak pendapatan perusahaan adalah sebesar 11% pada tahun 2010, 12% pada tahun 2011, 6% pada tahun 2012, turun 1% pada tahun 2013, naik 5% pada tahun 2014, 3% pada tahun 2015, dan turun 3% pada tahun 2016.

Table 1.19 Penerimaan pajak Kamboja Tahun 2009 – 2016 (KHR'000.000.00)

Item Name	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Revenue	6,806	8,023	8,114	9,590	11,392	13,304	13,837	14,288
<i>Of which: Nongrant</i>	4,978	5,698	6,436	8,017	8,991	11,307	12,168	14,038
<i>Tax</i>	4,156	4,751	5,289	6,424	7,265	9,297	10,719	11,453
Income, profits, and capital gains	744	800	960	1,276	1,561	1,964	2,472	2,472
Good and services	2,348	2,792	3,123	3,815	4,210	5,450	6,238	6,462
International trade and transactions	1,064	1,159	1,206	1,333	1,493	1,883	2,009	2,519
<i>Grants</i>	1,829	2,325	1,678	1,572	2,401	1,997	1,669	250
<i>Other revenues 1/</i>	822	947	1,147	1,593	1,726	2,010	1,449	2,585

Sumber data: *Cambodia Ministry of Economic and Finance* (diolah penulis)

Kemudian Kamboja juga merupakan negara yang menjadikan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negaranya. Persentase penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara berkisar antara 59-80%. Persentase penerimaan pajak didominasi oleh perdagangan barang dan jasa domestik, disusul perdagangan internasional baru kemudian *Income, profits, and capital gains*. Persentase *good and services* terhadap penerimaan pajak berkisar antara 56 – 59%,

sedangkan persentase *international trade and transactions* terhadap penerimaan pajak berkisar antara 19 – 26%. Selanjutnya persentase *income, profits, and capital gains* terhadap penerimaan pajak berkisar antara 17 - 23%. Lebih jauh lagi, persentase persentase *income, profits, and capital gains* terhadap penerimaan Negara berkisar antara 10 – 17%.

Table 1.20 Analisis Persentase *Tax, Good and services, International trade and transactions* dan *Income, profits, and capital gains*

Item Name	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Tax</i>	61%	59%	65%	67%	64%	70%	77%	80%
Income, profits, and capital gains terhadap Tax	18%	17%	18%	20%	21%	21%	23%	22%
Good and services terhadap Tax	56%	59%	59%	59%	58%	59%	58%	56%
International trade and transactions terhadap Tax	26%	24%	23%	21%	21%	20%	19%	22%
Income, profits, and capital gains terhadap Revenue	11%	10%	12%	13%	14%	15%	18%	17%

Sumber data: *Cambodia Ministry of Economic and Finance* (diolah penulis)

Tren kenaikan pendapatan Negara berkisar antara 1 – 16%, kenaikan penerimaan pajak berkisar antara 6 – 18% dan kenaikan *income, profits, and capital gains* berkisar antara 7 – 25% sedangkan di tahun 2016 dari tahun 2015 tidak mengalami peningkatan atau tetap.

Table 1.21 Analisis Tren Persentase Kenaikan *Revenue, Tax* dan *Income, profits, and capital gains*

Item Name	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Revenue	15%	1%	15%	16%	14%	4%	3%
<i>Tax</i>	13%	10%	18%	12%	22%	13%	6%
Income, profits, and capital gains	7%	17%	25%	18%	21%	21%	0%

Sumber data: *Cambodia Ministry of Economic and Finance* (diolah penulis)

Tabel 1.22 Penerimaan Negara Vietnam Tahun 2009 – 2016 (VND'000.000.00)

Item Name	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total revenue and grants	463	588	719	733	827	876	996	985
<i>Tax revenue</i>	373	483	608	617	685	717	764	816
Oil revenues	61	69	110	125	120	100	68	55
Non-oil tax revenues	312	414	497	493	565	617	697	761
<i>Grants</i>	8	12	12	10	11	11	12	3
<i>Other revenue</i>	82	93	100	106	131	147	219	166
Expenditure	572	648	749	954	1,094	1,123	1,256	1,277
<i>Expense</i>	349	414	511	662	773	804	910	964
Interest	20	25	30	40	54	67	83	95
Other expense	328	389	481	622	719	737	827	869
<i>Net acquisition of non-financial assets</i>	223	234	238	292	321	319	346	313
Net lending (+)/borrowing (-)	-109	-59	-29	-221	-267	-248	-261	-293
Net incurrence of financial liabilities	125	181	112	222	263	272	183	279
<i>Domestic</i>	32	92	55	176	185	231	128	189
Securities	-2	60	33	115	131	137	102	-
Loans	34	33	22	61	55	96	25	-
<i>Foreign</i>	93	89	56	47	78	42	55	90
Disbursement	103	99	80	75	105	81	92	120
Amortization	10	10	24	28	27	39	39	30
Net acquisition of financial assets	-16	-121	-82	-2	4	-25	78	14

Sumber data: *Statistic Handbook of Vietnam* (diolah penulis)

Sumber utama penerimaan negara Vietnam adalah pendapatan pajak yang berasal dari pendapatan minyak dan pendapatan diluar minyak. Persentase penerimaan pajak terhadap penerimaan negara Vietnam tahun 2009-2016 adalah sebesar 81% pada tahun 2009, 82% pada tahun 2010, 85% pada tahun 2011, 84% pada tahun 2012, 83% pada tahun 2013, 82% pada tahun 2014, 77% pada tahun 2015, 83% pada tahun 2016.

Tabel 1.23 Brunei Darussalam *Fiscal Balance From 2009 – 2016* (BND'000.00)

Item Name	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total Revenue	11,378	6,393	9,166	12,936	11,765	9,318	7,076	3,615
<i>Oil and gas revenue</i>	10,551	5,590	8,089	12,020	10,330	8,498	6,146	2,756
<i>Revenues from government operations</i>	661	744	886	903	1,403	775	868	827
Taxes	342	431	532	406	584	403	412	380
Fees, charges, and rent	278	294	302	330	330	338	423	397
Others	41	19	53	167	488	34	33	49
<i>Returns from investment and savings</i>	166	59	190	13	33	45	64	32
<i>Memorandum items:</i>								
Oil and gas sektor revenue	10,551	5,590	8,089	12,020	10,330	8,498	6,146	2,756
Non-oil sektor revenues	827	803	1,077	916	1,435	820	932	859
Oil and gas (in percent)	93	87	88	93	88	91	87	76

Sumber data: *Kementerian Kewangan Brunei Darussalam* dan Brunei Darussalam
IMF Country Report No. 15/146 (diolah penulis)

Brunei Darussalam mengandalkan penerimaan dari sektor minyak dan gas sebagai pendapatan utama negaranya. dengan persentase sebesar 93% pada tahun 2009, 87% pada tahun 2010, 88% pada tahun 2011, 93% pada tahun 2012, 88% pada tahun 2013, 91% pada tahun 2014, 87% pada tahun 2015, 76% pada tahun 2016. Sedangkan penerimaan pajak hanya berkisar antara 3 - 11% dari total pendapatan Negara yaitu sebesar 3% pada tahun 2009, 7% pada tahun 2010, 6% pada tahun 2011, 3% pada tahun 2012, 5% pada tahun 2013, 4% pada tahun 2014, 6% pada tahun 2015, 11% pada tahun 2016. Tren penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas berbanding terbalik dengan tren penerimaan pajak, jika sektor minyak dan gas menurun maka penerimaan pajak akan meningkat. Hal ini berarti Negara akan membebankan pengeluaran Negara pada rakyat jika perekonomian Negara mengalami kesulitan.

Tabel 1.24 Penerimaan Negara Laos Tahun 2009 – 2016 (LAK'000.00)

Iten Name	2008/9	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Revenue and Grants	8,099	9,779	13,891	16,958	19,187	21,723	23,305	17,964
<i>Of which: Resource revenue 1/</i>	1,357	1,376	2,098	2,716	...	2,535	2,402	2,293
Nonrenewable resources	1,567	2,232	...	1,879	1,611	1,115
Renewable resources	531	484	...	656	791	1,055
Nonresource revenue	8,084	9,712	...	14,318	15,983	13,414
Taxes	6,208	7,503	9,109	10,915	12,658	14,515	16,499	15,028
<i>Of which: Resource revenue 1/</i>	1,702	2,212	...	2,096	1,964	1,964
Nonrenewable resources	1,414	1,993	...	1,729	1,557	1,168
Renewable resources	288	219	...	367	406	650
Nonresource revenue	7,407	8,703	...	12,419	14,535	12,978
Income and profit taxes	1,728	1,587	2,136	2,940	3,044	2,748	3,134	2,840
Income taxes	425	462	543	744	856	939	1,089	990
Profit taxes	1,303	1,125	1,592	2,196	2,188	1,809	2,046	1,851
<i>Of which: Mining</i>	664	487	888	1,287	...	568	667	445
<i>Of which: Nonmining</i>	639	638	705	909	...	1,241	1,379	1,379
VAT	1,401	1,869	2,403	2,827	3,412	3,807	4,492	3,879
Excise duties	1,432	1,687	1,948	2,344	2,734	3,331	4,086	3,715
Import duties	726	832	965	1,047	1,205	1,548	1,827	2,108
Royalties	297	560	722	884	912	1,428	1,206	1,608
Mining	527	706	700	1,161	891	743
Hydropower	195	178	212	267	315	551
Other taxes	623	968	936	872	1,352	1,653	1,753	1,315
Other revenues	823	1,035	1,073	1,513	1,980	2,338	1,886	1,086
<i>Of which: Dividends</i>	507	764	...	1,055	664	664
<i>Of which: Resource revenue 1/</i>	396	504	...	439	439	351
Nonrenewable resources	153	239	...	150	54	...
Renewable resources	243	265	...	289	385	385
Nonresource revenue	677	1,009	...	1,899	1,447	827
Grants	1,068	1,242	3,709	4,531	4,549	4,870	4,920	2,263

Sumber data: 2015 LAO PDR IMF Country Report No. 15/45 (diolah penulis)

Sumber utama penerimaan negara Laos adalah pendapatan pajak selama tahun obserasi adalah sebesar 64 - 84% dari total penerimaan Negara, dengan persentase sebesar 77% pada tahun 2008/9, 77% pada tahun 2009/10, 66% pada

tahun 2010/11, 64% pada tahun 2011/12, 66% pada tahun 2012/13, 67% pada tahun 2013/14, 71% pada tahun 2014/15, 84% pada tahun 2015/16. Persentase *Income and profit taxes* terhadap penerimaan pajak tahun observasi adalah sebesar 19-27%, dengan persentase detail sebesar 28% pada tahun 2008/9, 21% pada tahun 2009/10, 23% pada tahun 2010/11, 27% pada tahun 2011/12, 24% pada tahun 2012/13, 19% pada tahun 2013/14, 19% pada tahun 2014/15, 19% pada tahun 2015/16. Sedangkan Persentase *Income and profit taxes* terhadap penerimaan negara adalah sebesar 13 - 21%, dengan persentase sebesar 21% pada tahun 2008/9, 16% pada tahun 2009/10, 15% pada tahun 2010/11, 17% pada tahun 2011/12, 16% pada tahun 2012/13, 13% pada tahun 2013/14, 13% pada tahun 2014/15, 16% pada tahun 2015/16

Tabel 1.25 Penerimaan Negara Myanmar Tahun 2009 – 2016 (MMK'000.00)

Item Name	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Revenue and grants	5,602	3,740	4,551	5,222	9,754	11,654	14,320	15,919
Tax revenue	4,898	1,077	1,318	1,678	3,244	4,236	5,076	6,309
Private sektor	621	442	723	1,185	1,942	3,214	3,661	5,089
Transfers from SEEs to Union Government	298	793	783	988	1,302	1,022	1,415	698
Profit transfers (from SEEs to Union Gvt.)	294	866	834	803	774	746	538	518
SEE receipts net of transfers to Union Government	29	1,706	2,022	2,376	5,258	5,646	6,179	7,027
Other nontax revenue 1/	83	163	427	180	453	880	2,323	1,503
Grants	1	0	0	0	26	146	204	382

Sumber data: 2015 Myanmar IMF *Country Report* No. 15/267 (diolah penulis)

Sumber utama penerimaan negara Myanmar adalah SEE atau *State Economic Enterprise* berupa penerimaan bersih SEE atas transfer ke pemerintah pusat, yaitu sebesar 43-54% dari total penerimaan negara, dengan persentase

detail sebesar 1% pada tahun 2008/9, 46% pada tahun 2009/10, 44% pada tahun 2010/11, 45% pada tahun 2011/12, 54% pada tahun 2012/13, 48% pada tahun 2013/14, 43% pada tahun 2014/15, 44% pada tahun 2015/16. Sedangkan penerimaan pajak menjadi penerimaan kedua terbesar setelahnya yaitu sebesar 30-40%, dengan persentase detail sebesar 87% pada tahun 2008/9, 29% pada tahun 2009/10, 29% pada tahun 2010/11, 32% pada tahun 2011/12, 33% pada tahun 2012/13, 36% pada tahun 2013/14, 35% pada tahun 2014/15, 40% pada tahun 2015/16.

Meskipun terdapat perbedaan tren pada tahun 2008/9, namun secara keseluruhan tren selama tahun observasi dapat dijelaskan seperti penjelasan diatas. Hal tersebut terjadi karena Negara Myanmar merubah kebijakan penerimaan Negara nya pada tahun 2009/10. Semula Negara Myanmar mengandalkan penerimaan pajak pada tahun 2008/9 sebagai sumber utama penerimaan Negara nya, namun kemudian pada tahun 2009/10 Myanmar mengandalkan SEE atau *State Economic Enterprise* atau pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan Negara nya. Perbedaan terlihat jelas karena tren peningkatan penerimaan perpajakan dari tahun 2008/9 ke tahun 2009/10 adalah turun sebesar 355%, sedangkan tren SEE pada tahun yang sama naik sebesar 98%. Selibhnya tren umum penerimaan pajak setelah tahun 2009/10 berkisar antara 17 – 21%, kecuali di tahun 2011/12 peningkatan yang terjadi sebesar 48%. Sedangkan tren umum penerimaan SEE adalah sebesar 7 – 16%, kecuali di tahun 2011/12 peningkatan yang terjadi sebesar 55%.

Sebagian besar negara di Asia Tenggara mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negaranya, hal tersebut ditunjukkan dengan persentase penerimaan pajak terhadap penerimaan negara tertinggi secara berurutan adalah Singapura sebesar 94-99%, Philipina sebesar 87-91%, Vietnam sebesar 77-85%, Indonesia sebesar 73-83%, Laos sebesar 64-84%, Malaysia sebesar 67-79%, Kamboja sebesar 59-80%, Thailand sebesar 55-69%, Myanmar sebesar 29-40% dan Brunei Darussalam sebesar 3-11%.

Selanjutnya penerimaan dari *corporate income tax* merupakan sektor yang memberikan sumbangsih terbesar bagi akumulasi penerimaan pajak secara keseluruhan. Berikut ini adalah penjelasan persentase *corporate income tax* terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan Negara tertinggi secara berurutan adalah Philipina sebesar 39 – 43%, Malaysia sebesar 19 – 30%, Thailand sebesar 19 – 26%, Singapura sebesar 20 – 24%, Laos sebesar 13 – 21%) Kamboja sebesar 10 – 18% dan Indonesia sebesar 10 – 14%. Sedangkan untuk Brunei Darussalam, Vietnam dan Myanmar mengambil dari sektor lain yang belum bisa dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 1.26 Ekpor Barang Dunia berdasarkan Kelompok Produk Utama Tahun 2008 – 2014 (USD'000.00)

Description	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Agricultural products	1,342	1,169	1,362	1,660	1,657	1,745	1,765
Fuels and mining products	3,530	2,263	3,026	4,008	4,139	3,997	3,789
Fuels	2,862	1,808	2,348	3,171	3,375	3,258	3,068
Manufactures	10,458	8,355	9,962	11,511	11,490	11,848	12,243
Iron and steel	587	326	421	527	486	454	472
Chemicals	1,705	1,447	1,705	1,997	1,957	2,001	2,054
Office and telecom equipment	1,561	1,323	1,603	1,680	1,674	1,750	1,794
Automotive products	1,234	847	1,092	1,287	1,295	1,348	1,395
Textiles	250	211	251	294	286	306	314
Clothing	362	316	351	412	423	460	483

Sumber data: *International Trade Statistic, World Trade Organization* (diolah penulis)

Berdasarkan data WTO dalam *International Trade Statistic, Automotive product* merupakan sektor terbesar ketiga dalam kelompok *manufactures* setelah industri *Chemicals* serta *Office dan telecom equipment*. Data ini menunjukkan penerimaan pajak dari *Corporate Income Tax* sektor otomotif menjadi salah satu sektor vital bagi penerimaan pajak di Asia Tenggara. Tercatat pada tahun 2013 sektor otomotif Indonesia menyumbang Rp 27,5 triliun untuk Pajak Pertambahan Nilai, Rp40 triliun untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan sisanya ke kas daerah melalui Bea Balik Nama dan Pajak Kendaraan Bermotor (Rini Yustiningsih: 2015).

Penerimaan tersebut merupakan penerimaan pajak yang tidak optimal dari sektor otomotif, pasalnya sektor otomotif merupakan salah satu sektor yang mengalami penurunan pada setidaknya 3 tahun terakhir. Pada tahun 2015 Target pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Indonesia mencapai 1. 484 triliun atau lebih tinggi dari APBN 2015

sebesar 1.380 triliun, angka itu naik sebesar 30% dari tahun 2014. Koran Tempo dalam salah satu artikelnya yang berjudul Target Pajak Gagal, Ini Prestasi Terburuk dalam 5 Tahun, menuliskan penerimaan pajak sepanjang triwulan I 2015 masih jauh dari target yang ditentukan pemerintah (Andi Rusli: 2015). Hal ini menunjukkan, negara Indonesia meningkatkan kebergantungan penerimaan negara pada sektor pajak, namun realisasinya masih jauh dari rencana karena banyak sektor industri mengalami kelesuan ekonomi.

Situasi perekonomian yang menurun serta naiknya tingkat suku bunga perbankan menambah tekanan terhadap penjualan kendaraan di dalam negeri menjadi penyebab penurunan pada awal tahun 2014 (Aria W. Yudhistira: 2014). Sepanjang tahun 2014 penjualan otomotif tidak secerah tahun-tahun sebelumnya. (Yuliantino Situmorang: 2014). Lebih jauh lagi, periode April 2015 penjualan mobil secara nasional anjlok. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), di bulan keempat 2015, penjualan kendaraan roda empat secara *whole sales* atau pabrik ke diler, hanya mencapai 81.600 unit. Angka ini turun drastis dibandingkan pada bulan sebelumnya, yang mencapai 99.410 unit. Pada periode yang sama April tahun lalu, penjualan mobil mencapai 106.124 unit. Selain itu, April 2015 juga bisa disebut sebagai masa paceklik, jika dibandingkan periode yang sama di 2012 dan 2013. Di dua tahun itu, masing-masing penjualan otomotif pada April mencapai 87.144 unit dan 102.262 unit (Krisna Wicaksono, Herdi Muhardi: 2015). Tidak hanya Indonesia yang masih terus berjuang untuk bangkit dari keterpurukan industri otomotifnya. Industri otomotif Thailand juga terus menurun. Industri otomotif Thailand mengalami

penurunan sejak Oktober 2013. Bahkan meski menjadi basis produksi untuk berbagai pabrikan untuk pasar global, rupanya tidak bisa membantu Thailand (M Luthfi Andika: 2015).

Kondisi penurunan ini membuat sejumlah pabrikan otomotif di Indonesia, hingga kini masih terus melakukan aksi perang diskon demi mendongkrak penjualan di 2015. Perang diskon ini dinilai masif, karena dilakukan hampir semua pabrikan otomotif baik roda dua maupun roda empat. Setidaknya, kondisi itu terlihat di dua pameran otomotif terbesar di Tanah Air, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIAS), dan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2015. Sejumlah pabrikan ramai-ramai memberikan promo diskon, mulai dari *cashback*, cicilan nol persen, dan sebagainya (Rendra Saputra: 2015). Namun sayangnya ternyata upaya perang diskon penjualan otomotif ini tidak mengangkat penjualan mobil di pasar (Hendra Gunawan: 2015).

Semakin tingginya persaingan antar perusahaan berpotensi menurunkan tingkat pendapatan perusahaan, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut tetap atau bertambah, hal tersebut tentu akan mempengaruhi laba perusahaan. Apabila kondisi seperti ini berlangsung lama, perusahaan akan mengalami kondisi *financial distress* atau terancam bangkrut. *Financial distress* memiliki arti bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang dekat dengan kebangkrutan, ditandai dengan gagalnya *forecast* pendapatan yang berdampak pada analisis profitabilitas perusahaan pada masa yang akan datang. Platt dan Platt (2002:142) menyatakan bahwa kegunaan informasi *financial distress* dalam perusahaan adalah supaya manajemen dapat mempercepat tindakan perbaikan dan

juga pencegahan masalah sebelum kebangkrutan benar-benar terjadi. Misalnya saja pihak perusahaan dapat mengambil tindakan *merger* atau *takeover* dengan perusahaan lain agar perusahaan mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan baik.

Tabel 1.27 Ekpor Barang Dunia berdasarkan Kelompok Produk Utama dan Daerah Tahun 2008 – 2014 (USD'000.00)

	W	NA	SCA	E	CIS	AF	ME	AS
Agricultural products	10,700	1,656	1,300	4,455	393	374	189	2,331
Fuels and mining products	24,752	2,497	1,895	5,107	3,181	2,539	5,313	4,220
Fuels	19,890	1,873	1,146	3,687	2,863	2,196	5,188	2,936
Manufactures	75,867	10,253	1,218	32,854	1,131	712	1,673	28,025
Iron and steel	3,273	217	121	1,379	341	66	46	1,101
Chemicals	12,866	1,708	287	7,108	291	143	527	2,802
Office and telecom equipment	11,385	1,446	38	2,575	20	22	113	7,173
Automotive products	8,498	1,637	162	4,414	47	62	104	2,067
Textiles	1,912	119	26	588	24	19	49	1,085
Clothing	2,807	76	92	903	16	72	48	1,601
Indeks: W: World, NA: North America, SCA: South and Central America, E: Europe, CIS: Commonwealth of Independent States, AF: Africa, ME: Middle East, AS: Asia								

Sumber data: *International Trade Statistic, World Trade Organization* (diolah penulis)

Data ekspor barang dunia berdasarkan kelompok produk utama dan daerah tahun 2008 – 2014 menunjukkan bahwa untuk industri otomotif, Asia merupakan regional kedua terbesar setelah Eropa. Hal ini berarti dengan menurunnya industri otomotif di Asia tenggara akan menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap industri otomotif dunia.

Di permulaan, perkembangan industri otomotif di Asia Tenggara sangat pesat. Berdasarkan data *ASEAN Automotive Federation* (AAF), pada tahun 2007, penjualan otomotif di Asia Tenggara mencapai 1.886.537 namun pada tahun 2012

telah mencapai 3.473.288 unit. Sedangkan untuk produksi, tahun 2007 mencapai 2.215.944 unit sedangkan pada tahun 2012 telah mencapai 4.237.980 unit. Dari sepuluh negara anggota ASEAN, hanya lima negara yang tercatat sebagai basis produksi yaitu Indonesia, Malaysia, Phipilina, Thailand, dan Vietnam.

Tabel 1.28 Data Produksi Sektor Otomotif di Asia Tenggara (Unit)

Country	Year	All Vehicles	FY-1	Var	MOTORCYCLES & SCOOTERS	FY-1	Var
Indonesia	2010	702,508	464,816	51%	7,395,390	5,884,021	26%
Malaysia		567,715	489,269	16%	467,941	436,430	7%
Philippines		80,477	62,523	29%	813,361	634,032	28%
Thailand		1,645,304	999,378	65%	2,024,599	1,634,113	24%
Vietnam		106,166	107,760	-1%			
Total		3,102,170	2,123,746		10,701,291	8,588,596	
Indonesia	2011	837,948	702,508	19%	8,006,293	7,395,390	8%
Malaysia		533,515	567,715	-6%	498,076	467,941	6%
Philippines		64,906	80,477	-19%	762,947	813,361	-6%
Thailand		1,457,795	1,645,304	-11%	2,043,039	2,024,599	1%
Vietnam		100,465	106,166	-5%			
Total		2,994,629	3,102,170		11,310,355	10,701,291	
Indonesia	2012	1,065,557	837,948	27%	7,079,721	8,006,293	-12%
Malaysia		569,620	533,515	7%	543,088	498,076	9%
Philippines		75,413	64,906	16%	588,292	762,947	-23%
Thailand		2,453,717	1,457,795	68%	2,606,161	2,043,039	28%
Vietnam		73,673	100,465	-27%			
Total		4,237,980	2,994,629		10,817,262	11,310,355	
Indonesia	2013	1,208,211	1,065,557	13%	7,780,295	7,079,721	10%
Malaysia		601,407	569,620	6%	543,088	543,088	1%
Philippines		79,169	75,413	5%	588,292	588,292	24%
Thailand		2,457,057	2,453,717	0%	2,218,625	2,606,161	-15%
Vietnam		93,630	73,673	27%			
Total		4,439,474	4,237,980		11,277,644	10,817,262	

Tabel 1.28 Data Produksi Sektor Otomotif di Asia Tenggara Lanjutan

Country	Year	All Vehicles	FY-1	Var	MOTORCYCLES & SCOOTERS	FY-1	Var
Indonesia	2014	1,298,523	1,208,211	7%	7,926,104	7,780,295	2%
Malaysia		596,418	601,407	-1%	439,907	549,244	-20%
Philippines		88,845	79,169	12%	755,184	729,480	4%
Thailand		1,880,007	2,457,057	-23%	1,842,708	2,218,625	-17%
Vietnam		121,084	93,630	29%			
Total		3,984,877	4,439,474		10,963,903	11,277,644	
Indonesia	2015	940,495	1,298,523	-28%	4,940,646	7,926,104	-38%
Malaysia		519,171	596,418	-13%	322,659	439,907	-27%
Philippines		83,874	88,845	-6%	657,338	755,184	-13%
Thailand		1,597,140	1,880,007	-15%	1,526,875	1,842,708	-17%
Vietnam		138,347	121,084	14%			
Total		3,279,027	3,984,877		7,447,518	10,963,903	
Indonesia	2016	1,177,389	1,098,780	7%			
Malaysia		545,253	614,664	-11%	395,938	382,218	4%
Philippines		116,868	98,768	18%	1,040,626	795,840	31%
Thailand		1,944,417	1,913,002	2%	1,820,358	1,807,325	1%
Vietnam		236,161	171,753	38%			
Total		4,020,088	3,896,967		3,256,922	2,985,383	

Sumber data: *Asean Automotive Federation Statistic* (diolah penulis)

Thailand merupakan Negara dengan tingkat produksi terbesar se Asia Tenggara disusul oleh Indonesia, Malaysia, Vietnam dan terakhir Philipina. Tahun 2011, sektor industri otomotif mengalami penurunan drastis, tahun 2012 mulai mengalami peningkatan kecuali pada Vietnam yang masih mengalami penurunan tingkat produksi mobil, sedangkan untuk sepeda motor tahun 2012 masih mengalami penurunan kecuali Thailand yang mampu meningkatkan produksi hingga 28%. Pada tahun 2013, produksi mengalami peningkatan kecuali di Thailand yang mengalami penurunan sebesar 15%. Tahun 2014, industri otomotif mengalami penurunan di semua Negara, kecuali Philipina dan Vietnam mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 industri otomotif mengalami penurunan.

Tahun 2016, mulai mengalami peningkatan kecuali Malaysia untuk industri mobil masih menurun sebesar 11%.

Tabel 1.29 Data Penjualan Sektor Otomotif di Asia Tenggara (Unit)

Country	Year	All Vehicles	FY-1	Var	MOTORCYCLES & SCOOTERS	FY-1	Var
Brunei	2010	13,589	12,365	10%			
Indonesia		764,710	483,550	58%	7,398,644	5,881,777	26%
Malaysia		605,156	536,905	13%	468,175	432,683	8%
Philippines		168,490	132,444	27%	759,849	636,889	19%
Singapore		51,891	79,503	-35%	8,281	8,883	-7%
Thailand		800,357	548,871	46%	1,845,997	1,535,461	20%
Vietnam		111,737	119,460	-6%			
Total		2,515,930	1,913,098		10,480,946	8,495,693	
Brunei	2011	14,555	13,589	7%			
Indonesia		894,164	764,710	17%	8,043,535	7,398,644	9%
Malaysia		600,123	605,156	-1%	494,586	468,175	6%
Philippines		141,616	168,490	-16%	731,130	759,849	-4%
Singapore		39,570	51,891	-24%	8,046	8,281	-3%
Thailand		794,081	800,357	-1%	2,007,383	1,845,997	9%
Vietnam		109,660	111,737	-2%			
Total		2,593,769	2,515,930		11,284,680	10,480,946	
Brunei	2012	18,634	14,555	28%			
Indonesia		1,116,212	894,164	25%	7,141,586	8,043,535	-11%
Malaysia		627,753	600,123	5%	537,753	494,586	9%
Philippines		156,654	141,616	11%	702,599	731,130	-4%
Singapore		37,247	39,570	-6%	9,923	8,046	23%
Thailand		1,436,335	794,081	81%	2,130,067	2,007,383	6%
Vietnam		80,453	109,660	-27%			
Total		3,473,288	2,593,769		10,521,928	11,284,680	
Brunei	2013	18,642	18,634	0%			
Indonesia		1,229,901	1,116,212	10%	7,771,014	7,141,586	9%
Malaysia		655,793	627,753	4%	546,719	537,753	2%
Philippines		181,738	156,654	16%	752,835	702,599	7%
Singapore		34,111	37,247	-8%	11,650	9,923	17%
Thailand		1,330,672	1,436,335	-7%	2,004,498	2,130,067	-6%
Vietnam		98,649	80,453	23%			
Total		3,549,506	3,473,288		11,086,716	10,521,928	

Sumber data: Asean Automotive Federation Statistic (diolah penulis)

Tabel 1.29 Data Penjualan Sektor Otomotif di Asia Tenggara (Unit) Lanjutan

Country	Year	All Vehicles	FY-1	Var	MOTORCYCLES & SCOOTERS	FY-1	Var
Brunei	2014	18,114	18,642	-3%			
Indonesia		1,208,019	1,229,901	-2%	7,908,941	7,771,014	2%
Malaysia		666,465	655,793	2%	442,749	546,719	-19%
Philippines		234,747	181,738	29%	790,245	752,835	5%
Singapore		47,443	34,111	39%	8,145	11,650	-30%
Thailand		881,832	1,330,672	-34%	1,701,535	2,004,498	-15%
Vietnam		133,588	98,649	35%			
Total		3,190,208	3,549,506		10,851,615	11,086,716	
Brunei	2015	12,157	18,114	-33%			
Indonesia		853,008	1,208,019	-29%	5,600,831	7,908,941	-29%
Malaysia		541,142	666,465	-19%	321,936	442,749	-27%
Philippines		234,951	234,747	0%	683,074	790,245	-14%
Singapore		61,784	47,443	30%	6,154	8,145	-24%
Thailand		621,742	881,832	-29%	1,394,771	1,701,535	-18%
Vietnam		164,571	133,588	23%			
Total		2,489,355	3,190,208		8,006,766	10,851,615	
Brunei	2016	13,248	14,406	-8%			
Indonesia		1,061,735	1,013,291	5%	6,215,350	6,708,384	-7%
Malaysia		580,124	666,677	-13%	396,343	380,802	4%
Philippines		359,572	288,609	25%	1,140,338	850,509	34%
Singapore		110,455	78,609	41%	8,336	7,459	12%
Thailand		768,788	799,632	-4%	1,738,231	1,639,090	6%
Vietnam		270,820	209,267	29%			
Total		3,164,742	3,070,491		9,498,598	9,586,244	

Sumber data: *Asean Automotive Federation Statistic* (diolah penulis)

Dari segi penjualan, Negara Singapura kerap mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2014. Secara umum, Negara lain mengalami fluktuasi tingkat penjualan, masalah mulai memuncak di tahun 2015 dimana tingkat penjualan mengalami penurunan, kecuali Negara Singapura yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, hanya Negara Singapura 41%, Vietnam 29% dan Indonesia 5% yang mengalami peningkatan penjualan sektor mobil. Penjualan sepeda motor

mengalami peningkatan, kecuali Indonesia yang mengalami penurunan sebesar 7%, sedangkan Philipina mengalami peningkatan terbesar yaitu sebesar 34%.

Pada gambar di bawah terlihat bahwa Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan pasar utama industri otomotif di ASEAN. Indonesia merupakan pasar terbesar produk otomotif di Asia Tenggara dengan jumlah penjualan tahun 2011 sebesar 894.164 unit. Jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduknya, maka pasar Indonesia masih terbuka sangat luas. Namun demikian, produksi otomotif di Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan jumlah produksi di Thailand.

Gambar 1. 1 Peta Otomotif ASEAN



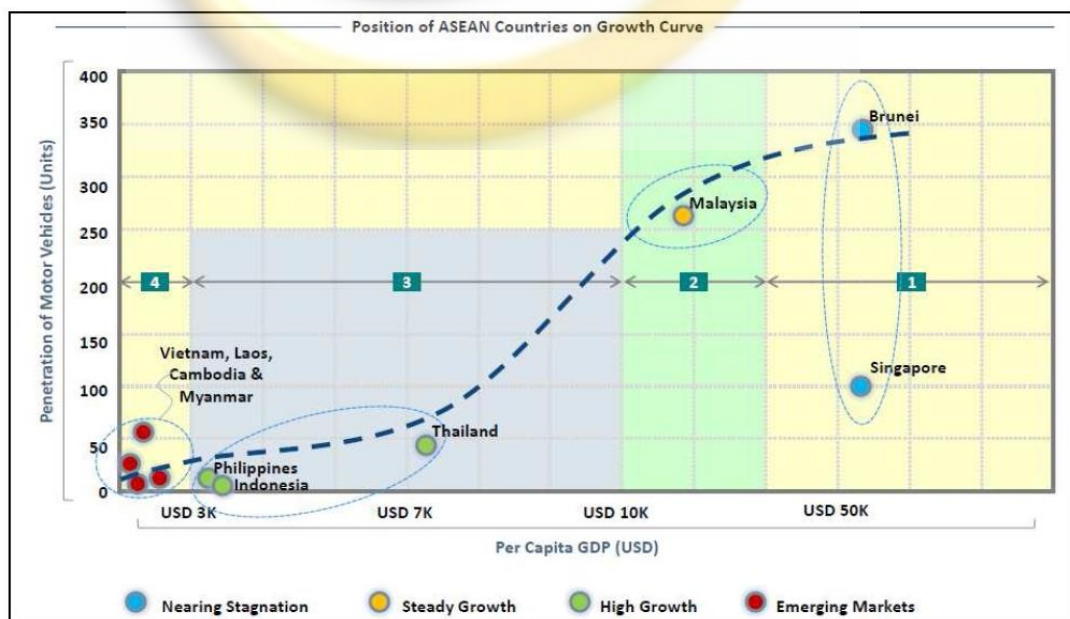
Sumber data: *Thailand Automotive Institute*

Dari gambar tersebut juga terlihat bahwa Thailand menjadi negara produsen otomotif terbesar di ASEAN. Pada tahun 2012, jumlah produksi kendaraan bermotor roda empat Thailand sebesar 2.453.717 unit sedangkan pasar dalam negeri hanya sebesar 1.436.335 sehingga hampir 50% produksi kendaraan

bermotor roda empat di Thailand ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan kondisi tersebut, Indonesia sangat potensial menjadi pasar ekspor produk otomotif dari Thailand terutama karena tarif bea masuk produk otomotif telah 0% dalam rangka kerja sama *ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)*. Hal ini juga didukung oleh riset dari Frost & Sullivan yang memperlihatkan kurva pertumbuhan industri otomotif di ASEAN.

Kurva di bawah ini memperlihatkan posisi pertumbuhan masing-masing negara anggota ASEAN. Dari 10 negara anggota ASEAN, 3 negara mengalami pertumbuhan yang tinggi yaitu Thailand, Indonesia, dan Philipina. Populasi kendaraan bermotor per 1.000 penduduk di tiga negara tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan populasi kendaraan bermotor di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Hal ini memperlihatkan besarnya peluang pertumbuhan industri otomotif di tiga negara tersebut.

Gambar 1. 2 Kurva Pertumbuhan Otomotif ASEAN



Sumber data: *Frost & Sullivan*

Dalam rangka menghadapi perjanjian perdagangan bebas regional dan juga dalam menghadapi *ASEAN Economic Community 2015*, Frost & Sullivan mengidentifikasi 7 variabel yang diperlukan dalam menghadapi persaingan pada industri otomotif. Salah satu kunci sukses agar dapat bersaing di pasar global adalah kemampuan untuk memenuhi atau melampaui standar-standar yang berlaku. Peningkatan kompetensi kompetensi global telah menimbulkan pengharapan konsumen yang semakin besar berkaitan dengan kualitas (Simmons dan White: 1999). Pengendalian kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan dan mencapai kualitas suatu produk atau jasa. Tujuan pengendalian kualitas adalah terciptanya suatu perbaikan kualitas yang berkesinambungan (*continuous improvement*). Perusahaan membutuhkan alat bantu sebagai tolak ukur agar kebutuhan khusus pelanggan (*customer specific requirement*) dapat dipenuhi oleh perusahaan.

Tuntutan kebutuhan mendorong terbentuknya sebuah standarisasi yang memuat kaidah-kaidah jaminan kualitas yang bertaraf internasional. Standar ini menjamin keseragaman dalam kualitas yang membentuk pemahaman bahwa produk yang dihasilkan akan dapat diterima secara internasional sebagai produk berkualitas. Hal ini merupakan aspek penting dalam liberalisasi perdagangan. Salah satu standar mutu yang telah diakui banyak kalangan bisnis adalah ISO 9000 sedangkan khusus untuk perusahaan otomotif standar mutu yang digunakan adalah ISO/TS 16494. Standar ISO menjadi wajib bagi banyak produsen untuk dapat bersaing di pasar internasional, dengan menunjukkan konsistensi mutu produk yang dihasilkan. Sertifikat ISO terkait mutu merupakan sertifikat yang

menandakan bahwa perusahaan telah dinilai dan hasilnya telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan standar ISO. Pelaksanaan ISO terkait mutu telah diterima di seluruh dunia sebagai langkah pertama yang berguna untuk menuju Total Quality Management (TQM). Oleh karena itu, sejak dibentuk pada tahun 1987 sampai sekarang, jumlah organisasi yang telah disertifikasi terus bertambah.

Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO terkait mutu akan memperoleh beberapa manfaat antara lain meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan melalui jaminan kualitas yang terorganisasi dan sistematis. ISO terkait mutu menghasilkan peningkatan kinerja operasi melalui pengurangan proses tindakan korektif dan penghapusan, meningkatkan profitabilitas, dan keunggulan pemasaran yang berasal dari pengakuan internasional atas logo ISO. Keunggulan semacam itu secara khusus penting untuk perusahaan dengan strategi penjualan internasional (Simmon dan White: 1999).

Perusahaan mengharapkan dengan memperoleh sertifikat ISO terkait mutu dapat memberikan dampak positif melalui peningkatan nilai penjualan produk yang berkualitas dan memiliki harga yang kompetitif, diharapkan tingkat penjualan perusahaan baik domestik maupun asing dapat lebih meningkat dibandingkan sebelum perusahaan memiliki sertifikat ISO. Tentu saja, selain memperoleh sertifikasi ISO terdapat hal-hal lain yang menunjukkan kinerja perusahaan. Hal tersebut tertuang dalam kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini mencoba menemukan bukti empiris apakah terdapat pengaruh sertifikasi ISO dan kinerja keuangan terhadap *financial distress* dan dampaknya terhadap penerimaan pajak di Asia Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perolehan sertifikasi ISO terkait mutu berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba?
2. Bagaimana kinerja keuangan dengan alat ukur Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba?
3. Bagaimana kinerja keuangan dengan alat ukur Rasio *Leverage* berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba?
4. Bagaimana kinerja keuangan dengan alat ukur Rasio Profitabilitas berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba?
5. Bagaimana kinerja keuangan dengan alat ukur Rasio Aktifitas berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba?
6. Bagaimana kinerja keuangan berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba?
7. Bagaimana *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui bahwa perolehan sertifikasi ISO terkait mutu dan kinerja keuangan perusahaan otomotif berpengaruh terhadap laba perusahaan

yang kemudian akan berpengaruh kepada penerimaan pajak. Penulis akan menggunakan data dan informasi tersebut sebagai bahan penyusunan suatu bentuk karya ilmiah berupa tesis, yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana perolehan sertifikasi ISO terkait mutu berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan dengan alat ukur Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba.
3. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan dengan alat ukur Rasio *Leverage* berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba.
4. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan dengan alat ukur Rasio Profitabilitas berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba.
5. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan dengan alat ukur Rasio Aktifitas berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba.
6. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba.

7. Untuk mengetahui sejauh mana *financial distress* perusahaan yang tercermin dalam laba berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan secara teoritis sehingga dapat sumbangan informasi bagi pihak-pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang tertarik pada informasi mengenai sertifikasi ISO terkait mutu dan kinerja keuangan dalam hubungannya dengan *financial distress*, laba dan penerimaan pajak.

2. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Penulis

Sebagai media aktualisasi diri meraih masa depan yang cerah dunia dan akhirat, mengembangkan pola pikir ilmiah serta memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai Akuntansi pada umumnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi hal-hal terkait tema pada khususnya.